

**EFEK RACHET DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN ANGGARAN
BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Putri Intan Permata Sari
putriintanpermatasari@upiypk.ac.id, Akuntansi, Universitas Putra Indonesia “YPTK”
Padang

Ronni Andri Wijaya
awheronniwijaya@yahoo.co.id, Akuntansi, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang

Deni Saputra
denisaputra@upiypk.ac.id, Akuntansi, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang

Agam Mei Yudha
agammeiyudha@upiypk.ac.id, Manajemen, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang

Abstrak

Praktik efek *ratcheting* timbul dalam penyusunan anggaran yang mengarah kepada bentuk perilaku oportunistik dengan cara mengubah kesesuaian anggaran *real* pada saat tahun berjalan sebelum akhir tahun anggaran. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji adakah di dalam anggaran pendapatan asli daerah dan belanja pemerintah daerah terdapat praktik efek *ratchet*. Bentuk penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat periode 2018-2019. Di dalam penelitian ini, terdapat jumlah populasi yang digunakan sebanyak 50 SKPD Provinsi Sumatera Barat serta teknik dalam pengambilan sampel yang dilakukan didalam penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengujian hipotesis yang dilakukan didalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model regresi linear sederhana. Hasil penelitian membuktikan bahwa terjadinya efek *ratchet* dalam anggaran pendapatan asli daerah dan anggaran belanja daerah.

Kata Kunci : efek *ratchet*, anggaran, pendapatan asli daerah, belanja daerah

**THE RACHET EFFECT IN THE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGETS OF
SKPD IN THE PROVINCE OF WEST SUMATERA**

Abstract

The practice of the ratcheting effect arises in the preparation of the budget which leads to a form of opportunistic behavior by changing the suitability of the real budget during the current year before the end of the fiscal year. The purpose of this research is to test whether there is a practice of ratchet effect in the local government revenue and expenditure budget. The form of this research is quantitative descriptive research. The type of data used in this study is secondary data obtained from the Budget Realization Report of the SKPD of the West Sumatra Province for the 2018-2019 period. In this study, there were 50 population

organizations used in the Province of West Sumatra Province and the sampling technique used in this study was using purposive sampling technique. Hypothesis testing conducted in this study is to use a simple linear regression model. The results of the study prove that there is a ratchet effect in the regional original revenue budget and regional expenditure budget.

Keywords: ratchet effect, budgeting, locally generated revenue, local government spending

PENDAHULUAN

Dengan diterapkannya sistem pemerintahan di Indonesia secara desentralisasi melalui peraturan yang tercantum di dalam undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka segala bentuk kegiatan pemerintahan diurus sendiri oleh daerahnya termasuk penyusunan dan pengalokasian anggaran. Di Indonesia ada namanya anggaran pemerintah daerah yang disebut juga dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Abdullah & Junita, 2016). Di dalam anggaran, adanya sesuatu yang dibutuhkan yaitu penyesuaian dan revisi yang seiring dengan adanya meningkatnya kebutuhan, adanya suatu kejadian yang mengakibatkan anggaran tersebut diralat kembali dan adanya kelebihan dana anggaran yang muncul dari tahun sebelumnya pada suatu daerah (Anessi-Pessina et al., 2012). Didalam realisasi penganggaran, terdapat dua kemungkinan yaitu sesuatu yang telah direalisasikan berbeda dengan yang dianggarkan, dapat mengalami kekurangan anggaran, dan dapat juga mengalami kelebihan anggaran. Lee & Plummer (2007) menjelaskan bahwa perubahan anggaran adalah hal yang pantas terjadi, ini disebabkan adanya peningkatan anggaran pemerintah karena kemungkinan, pemerintah melihat ada sesuatu hal yang serius harus diselesaikan sehingga terjadinya perubahan anggaran tersebut. Adapun yang menjadi perhatian disini yaitu mengenai sisa anggaran pada periode tahun yang lalu yang akan dikalkulasikan nantinya untuk perencanaan anggaran tahun yang akan datang. Hal ini dapat dikatakan, penyusunan anggaran tersebut sudah mengikuti besaran dan telah mengikuti pola anggaran tahun sebelumnya. Hal ini lah yang disebut dengan *budget ratcheting*. Forrester & Mullins (1992). Anggaran pemerintah sendiri merupakan suatu proses politik sehingga mengakibatkan penganggaran yang masih bersifat tertutup dan melibatkan sedikit politisi dan birokrasi (Andrean & Sari, 2020). Hal ini akan membuat anggaran tidak ditampilkan secara transparan dan memberikan ruang kepada pemerintah untuk melakukan penyelewengan penggunaan anggaran. Dalam Isaken (2005) menyatakan bahwa meskipun perencanaan anggaran tidak memiliki kaitan langsung dengan uang secara riil tetapi penyusunan anggaran akan memberikan celah bagi pemerintah untuk melakukan tindakan korupsi dengan melakukan pembayaran aktual atau transfer uang pada tahap realisasi.

Nurhayati & Suhendar (2018) menjelaskan bahwa pada dasarnya *budget ratcheting* merupakan sebuah upaya pemerintah daerah untuk memberikan gambaran kinerja di masa lalu dalam rangka untuk memperbaiki dan merevisi pencapaian target suatu hal yang akan menjadi objek penganggaran tersebut. *Budget ratcheting* juga merupakan suatu keadaan dimana pihak yang berkepentingan yang menentukan pembuatan perencanaan target di masa yang akan datang, dengan berdasarkan acuan target kinerja saat ini. Istilah *ratcheting* dalam anggaran pemerintah pertama kali diperkenalkan oleh Weitzman (1980) dengan mengembangkan model dimana perencana ekonomi menggunakan kinerja saat ini sebagai dasar parsial untuk menetapkan target kinerja untuk periode berikutnya yang kemudian disebut dengan *ratchet principle*. Di dalam penyusunan anggaran dengan efek *ratchet* ini, adanya suatu dorongan perilaku untuk mengambil keuntungan dengan cara mengubah realisasi anggaran yang telah berjalan sebelum jangka waktu anggaran tersebut berakhir.

Analisis teori keagenan menyatakan bahwa pihak yang berkepentingan atau prinsipal dapat menjadikan kinerja agen pada tahun sebelumnya sebagai patokan dengan tujuan dapat memperkuat jumlah penyusunan anggaran kinerja periode di masa yang akan datang (Fisher et al. (2006; Weitzman (1980)). Pernyataan ini diperkuat oleh Susanto & Halim (2018) yang memiliki hasil kesimpulan bahwa di ruang lingkup pemerintah daerah masih ada temuan mengenai efek *ratchet* yang berperilaku menguntungkan untuk kepentingan pribadi atas fasilitas fisik yang dibutuhkan oleh daerah tersebut sehingga menimbulkan asimetri informasi yang dilakukan dengan cara pemberian insentif bagi pihak penyusun anggaran agar dapat melancarkan praktik tersebut demi keuntungan pribadi, sehingga praktik efek *ratchet* merupakan tindakan sikap dan perilaku yang ingin menguntungkan diri sendiri ini selalu ada antara prinsipal dan agen (Indjejikian & Nanda, 1999). Hal inilah yang akan menimbulkan kesalahan informasi atau asimetri informasi sehingga adanya kekeliruan bagi principal dalam menilai kapasitas riil kinerja agen tersebut, sehingga terciptalah slack, dan manipulasi anggaran terhadap aktivitas riil (Bouwens & Kroos, 2011). Kegiatan perilaku yang seperti inilah yang dapat mendorong adanya kecenderungan terhadap suatu aktivitas yang melebihi kapasitas sehingga anggaran yang telah ditetapkan digunakan tidak akan mencukupi sehingga, terbentuklah perubahan anggaran. Tentu ini menjadi peluang bagi pihak yang berkepentingan tersebut untuk melakukan perilaku tersebut yang menguntungkan dirinya sendiri (Lee & Plummer, 2007).

Di dalam penganggaran sektor publik, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas dengan berbagai konteks mengenai efek *ratchet* diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdullah & Junita (2016) menyatakan bahwa setiap pihak, baik itu pengusul anggaran maupun pemberi persetujuan, memiliki kepentingan masing-masing sehingga ketika penyusunan anggaran dilakukan, maka terjadilah masalah keagenan sehingga *budget ratcheting* dapat menjadi salah satu unsur yang mengakibatkan kenaikan belanja daerah tersebut sehingga penganggaran perencanaan kinerja perbandingannya akan jauh dibandingkan dengan realitanya. Hal ini justru mengakibatkan kerugian nantinya dan akhirnya pendapatan asli daerah tidak mampu menutupi belanja daerah. Andrean & Sari (2020) yang melakukan penelitian dengan objek pada 19 kabupaten dan kota provinsi Sumatera Barat periode 2013-2017 yang juga mendukung penelitian terdahulu sebelumnya dengan memberikan penjelasan dengan adanya perlakuan *budget ratcheting* akan meningkatkan belanja daerah di akhir tahun berjalan, hal ini tentu lama kelamaan mengakibatkan kerugian besar dan berdampak pada krisis keuangan pada daerah, sehingga nanti untuk kedepannya pencairan dana bagi daerah yang membutuhkan perbaikan fisik sangat sulit akibat dari perilaku kepentingan pribadi tersebut. Dipenelitian ini juga menyimpulkan bahwa dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera, dimana kota Palembang memiliki *budget ratcheting* tertinggi. Pratiwi et al. (2020) menyatakan bahwa terdapat korelasi antara *budget ratcheting* dengan kinerja pada Kota Baubau periode 2014-2016. Arsani & Sihombing (2020) menyimpulkan bahwa adanya indikasi *asymmetric ratchet* terhadap komponen pengeluaran pada saat situasi pandemi di Indonesia yang dibuktikan dengan adanya perencanaan anggaran yang menjadi patokan adalah anggaran tahun sebelumnya, tetapi bukan tahun sebelumnya lagi. Hal ini dikarenakan, tahun tersebut tidak bias dijadikan patokan karena tahun tersebut masih keadaan normal dan belum terjadi pandemi sehingga anggaran tahun sebelumnya atau yang sudah terjadi pandemi, itulah yang dijadikan sebagai penentu anggaran periode saat ini, karena pada periode tahun sebelum-sebelumnya sudah tidak bisa dijadikan pedoman dalam perencanaan penganggaran, karena situasi sudah berubah yaitu situasi pandemi. Karena itu, dilakukanlah suatu perubahan anggaran yang kemudian nanti akan dibandingkan antara anggaran yang telah direncanakan dengan anggaran yang telah berjalan sampai kebutuhan tersebut telah terpenuhi (varian anggaran) (Bawono et al., 2012). Adapun penelitian terdahulu yang selanjutnya memperkuat penelitian terdahulu sebelumnya yaitu penelitian Nurhayati &

Suhendar (2018) yang juga membahas mengenai *budget ratcheting*. Dalam pernyataan penelitian ini, praktik *budget ratcheting* akan menambah belanja daerah sehingga kelebihan anggaran tersebut sebagian besar dijadikan sebagai keuntungan pribadi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2019) pada kabupaten dan kota di provinsi aceh tentang *budget ratcheting* yang menggambarkan bahwa efek *ratcheting* tersebut, telah mempengaruhi anggaran belanja daerah sehingga antara perencanaan dengan realitanya tidak sesuai dan jauh dari penganggaran yang ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2018) mengenai efek *ratchet* yang memiliki pandangan bahwa akibat adanya efek *ratchet* ini sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD), hal ini dikarenakan kelebihan anggaran tersebut tidak kembali lagi ke kas daerah, jadi lama kelamaan kas daerah yang dari pendapatan daerah makin berkurang. Begitu juga belanja langsung, juga menjadi imbas masalah tersebut karena anggaran untuk kedepannya pencairannya tidak efisien lagi. Di samping itu penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari Andrean & Sari (2020) yang membahas mengenai efek *ratchet* dengan melakukan suatu pengembangan pengujian terhadap ruang lingkup kewenangan organisasi perangkat daerah untuk menjelaskan dengan lebih luas lagi fenomena yang tergambar pada perilaku efek *ratchet* pada penganggaran pemerintah daerah di Sumatera Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Agency theory merupakan teori yang menjelaskan bagaimana kontra antara prinsipal dan agen. Yang dimaksud prinsipal disini adalah pihak yang memberi perencanaan, mengatur dan mengambil keputusan terhadap agen dan saling bekerjasama dalam melaksanakan tujuan tersebut, dimana pemerintah yang berwenang mendapatkan nama baik karena bertanggung jawab dengan baik mengenai apa yang diamanahkan kepada mereka, dan sebaliknya masyarakat mendapatkan kepuasan dalam menikmati hasil dari yang diamanahkan kepada pemerintah tersebut (Anton, 2010). Dalam hal ini, rakyat merupakan prinsipal dan pejabat pemerintah sebagai agen. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjalankan pemerintahan dan memberikan informasi terkait dengan sesuatu yang telah dijanjikan tersebut kepada masyarakat. Realita yang terjadi, masyarakat menjadi kurang puas terhadap hal itu, karena ada ketidak sesuaian antara hasil dengan yang telah dijanjikan sebelumnya (Afyansyah, 2013). Setyaningrum & Syafitri (2012) menyatakan bahwa dengan adanya hubungan keagenan tersebut akan menimbulkan masalah asimetri informasi dimana pihak agen atau pemerintah memiliki informasi yang lebih banyak dari pada pihak prinsipal atau masyarakat, bahkan banyaknya informasi di pihak pemerintah, tidak semua yang dinyatakan dengan benar. Persoalan ini semakin menjadi nyata ketika masyarakat tidak memiliki saran atau intitusi formal untuk mengawasi kinerja pihak agen agar bias dikontrol dengan baik, sehingga perilaku *moral hazard* dapat terjadi dengan mudah.

Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah di Indonesia

Dalam proses penganggaran pemerintah di Indonesia selalu dilakukan usaha untuk perbaikan seperti penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Penerapan sistem anggaran berbasis kinerja dengan kriteria evaluasi kinerja dilakukan untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran di tingkat kementerian negara/lembaga maupun perangkat daerah yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) dan diikuti dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2007 serta Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 mengenai evaluasi kinerja pemerintah daerah berikut penyusunan peraturan daerah yang memberikan legitimasi

ketercapaian kinerja pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Bentuk sederhana yang harus dipenuhi dalam penerapan anggaran berbasis kinerja ini adalah (Robinson & D., 2009):

1. Informasi mengenai sasaran dan hasil dari pengeluaran pemerintah dalam bentuk indikator kinerja dan evaluasi program sederhana
2. Proses penyusunan anggaran yang dirancang untuk memfasilitasi penggunaan informasi tersebut.

Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut dengan APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Siklus penyusunan APBD diaali dengan penyampaian kebijakan umum (KUA) APBD sebagai landasan penyusunan rancangan APBD kepada DPRD. Berdasarkan KUA APBD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan penyusunan anggaran bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kepala SKPD elanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana Kerja dan Anggaran ini disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana Kerja dan Anggaran ini kemudian disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahulua RAPBD.

Efek Ratchet pada Penganggaran Pemerintah Daerah

Efek *ratchet* dalam penyusunan anggaran muncul dalam bentuk perilaku oportunistik eksekutif dengan memodifikasi realisasi anggaran tahun berjalan menjelang akhir tahun anggaran. Dengan adanya efek ratchet maka anggaran pada periode mendatang akan sama dengan anggaran periode berjalan ditambah penyesuaian (efek *ratchet*) yang ditentukan berdasarkan selisih pada periode berjalan. Efek *ratchet* pada anggaran pemerintah berkaitan dengan kerugian masyarakat akibat pertumbuhan anggaran yang tidak efisien (Lee & Plummer, 2007).

Penelitian ini akan berfokus pada efek *ratchet* yang muncul dalam proses penganggaran melalui penggunaan anggaran pada dua komponen APBD, yaitu Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran sedangkan belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam epriode tahun anggaran.

Hipotesis Penelitian

Efet Ratchet pada Penganggaran Pendapatan Daerah

Penganggaran pendapatan daerah adalah sebuah perencanaan yang dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan terkait objek pendapatan khusus atau potensi yang ada pada daerah tersebut untuk penentuan target pendapatan yang diatur di dalam (UU, PP, Perda), seperti data potensi pajak dan retribusi daerah, tren proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah, serta hasil kekayaan daerah yang dipisahkan selama periode tertentu (Susanto & Halim, 2018). Pemerintah sebagai pelaku pihak yang memberikan wewenang, peraturan juga sering banyak mengalami permasalahan atau kendala berupa bias dan kesalahan (*error*) sehingga terkadang target pendapatan dapat ditentukan lebih tinggi (*overforecast*) atau juga lebih rendah (*underforecast*), hal ini tergantung pada tujuan kebijakan yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam situasi dan kondisi tertentu (Voorhees, 2006). Apabila adanya target peningkatan jumlah pendapatan pada tingkat tertentu, jika dilihat dari basis realisasi

pendapatan tahun sebelumnya, hal ini akan menjadi keputusan atau kebijakan bagi pemerintah untuk meningkatkan belanja/pengeluaran pada tahun berikutnya. Hal demikian disebut dengan *pro cyclical ratchet* dalam anggaran (Marlowe, 2009). Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, maka, dapat diungkapkan hipotesis pertama penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Terjadi efek *ratchet* dalam penganggaran Pendapatan Daerah

Efek Ratchet pada Penganggaran Belanja Daerah

Pemerintah sebagai agen, disamping semua informasi yang ada olehnya, dia juga sebagai pengambil keputusan dan kebijakan yang akan ditetapkannya terutama dalam kegiatan belanja daerah. Didalam komponen belanja daerah dalam APBD terdiri dari dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Perilaku efek *ratchet* ini sangat menimbulkan kerugian yang besar bagi keuangan daerah itu, serta berimbas kepada keuangan Negara. Hal ini membuktikan bahwa agen yang bersikap ingin mencari keuntungan sendiri dalam penganggaran belanja dengan cara meningkatkan perkiraan anggaran periode selanjutnya. Dengan keadaan yang seperti ini otomatis berimbas kepada pertumbuhan anggaran yang tidak efisien untuk periode selanjutnya, karena banyak dana yang dikeluarkan untuk membiayai sesuatu yang sifatnya kurang bermanfaat, sehingga adanya modifikasi anggaran tersebut untuk nantinya menjadi keuntungan tersendiri bagi agen tersebut (Lee & Plummer, (2007); Marlowe (2009)). Adanya perilaku rasa ingin menguntungkan diri sendiri itu dalam pelaksanaan belanja pemerintah, dinyatakan dengan lebih banyaknya respon yang mendukung kepada varian positif (*overspending*) dibandingkan dengan varian negatif (*underspending*). Banyaknya respon yang mendukung kepada varian positif (*overspending*) inilah yang menjadi dasar dalam penentuan anggaran dimasa yang akan datang (Lee & Plummer, 2007). Jadi, dengan demikian dalam belanja pemerintah cenderung mengalami peningkatan anggaran untuk periode selanjutnya, sehingga otomatis akibatnya anggaran belanja pemerintah cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Marlowe, 2009). Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, maka, dapat diungkapkan hipotesis kedua penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Terjadi efek *ratchet* dalam penganggaran belanja daerah.

METODE

Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, adapun sumber data yang diperoleh peneliti yaitu dari Badan Keuangan Daerah melalui website DPKD Provinsi Sumatera Barat (dpkd.sumbarprov.go.id, 2020). Adapun jenis penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada periode 2018-2019.

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh SKPD yang terdapat pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 50 SKPD. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Ketersediaan data
2. Memiliki komponen Pendapatan Asli Daerah dan komponen Belanja Daerah
3. Merupakan data APBD terbaru atau pembaharuan terakhir.

Dari kriteria tersebut diperoleh 24 SKPD yang memiliki komponen PAD dan 42 SKPD yang memiliki komponen Belanja Daerah.

Model dan Pengukuran Variabel

Efek *ratchet* dalam anggaran organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat diukur dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh (Weitzman, 1980):

$$A_{APBD_t} - A_{APBD_{t-1}} = \alpha_0 + \alpha_1 (R_{APBD_{t-1}} - A_{APBD_{t-1}}) \quad (1)$$

Kemudian dimodifikasi kembali oleh (Lee & Plummer, 2007) dengan model persamaan sebagai berikut:

$$A_{APBD_t} - A_{APBD_{t-1}} = \beta_0 + \gamma^+(R_{APBD_{t-1}} - A_{APBD_{t-1}}) + \gamma^-(R_{APBD_{t-1}} - A_{APBD_{t-1}}) \quad (2)$$

Model ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat efek *ratchet* pada anggaran pendapatan daerah maupun pada anggaran belanja daerah, dimana:

- A_{APBD_t} : Anggaran pada tahun berjalan
- $A_{APBD_{t-1}}$: Anggaran pada tahun sebelumnya
- $R_{APBD_{t-1}}$: Realisasi pada tahun sebelumnya
- Koefisien γ^+ : Penyesuaian untuk varian positif
- Koefisien γ^- : Penyesuaian untuk varian negatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan maka diperoleh statistik deskriptif untuk total belanja daerah dan pendapatan asli daerah yang disajikan dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah				Belanja Daerah			
	<i>underforecast</i>		<i>overforecast</i>		<i>underspending</i>		<i>overspending</i>	
	SKPD	%	SKPD	%	SKPD	%	SKPD	%
2018	21	84%	4	16%	42	100%	0	0%
2019	15	60%	10	40%	22	52%	20	48%
Rata-Rata		72%		28%		76%		24%

Sumber: Diolah Peneliti

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum *underforecast* dan *underspending* memiliki nilai yang lebih tinggi daripada *overforecast* dan *overspending* dengan rata-rata *underforecast* dan *underspending* masing-masing sebesar 72% dan 76%. Susanto & Halim (2018) menjelaskan bahwa *underforecast* dapat dikatakan penetapan target pendapatan lebih rendah dari kapasitas fisik yang sesungguhnya, jadi hal ini yang menimbulkan kesenjangan anggaran (*slack*) dalam menetapkan anggaran belanja daerah sedangkan dilihat dari sisi *underspending* dapat dilihat bahwa kenyataan dalam pencapaian kinerja anggaran belanja yang ditetapkan, itu lebih tinggi dibandingkan realisasi atau capaian kinerja anggaran belanja tahun sebelumnya. Hasil ini menunjukkan bahwa penetapan target anggaran yang berbasis kinerja, terjadinya perilaku penyusun anggaran yang bias dan juga terjadinya *asymmetric ratchet* dalam menetapkan target tersebut.

Hasil Pengujian Hipotesis

Dengan pengolahan yang menggunakan SPSS 25, hasil pengujian statistik adalah menunjukkan hasil dari nilai koefisien *ratcheting* dalam anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah pada SKPD Provinsi Sumatera Barat. Adapun syarat untuk menyatakan bahwa adanya efek *ratcheting* dalam anggaran daerah yang berdasarkan rancangan pengujian hipotesis apabila $\gamma \neq 0$ (Marlina, 2019).

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Pendapatan Daerah

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Pendapatan Daerah					
(Constant)	8315434	799299387		.104	.918
	99.903	2.234			
$\gamma^+(R_APBD_{t-1} - A_APBD_{t-1})$	1.062	.491	.292	2.162	.036
$\gamma^-(R_APBD_{t-1} - A_APBD_{t-1})$	-.842	.349	-.327	-2.416	.020

Sumber: Data Diolah

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai koefisien untuk varian positif Pendapatan Daerah sebesar 1,062 dimana hal ini menunjukkan bahwa terjadinya efek *ratchet* dalam anggaran pendapatan asli daerah sedangkan untuk varian negatif tidak terjadi efek *ratchet* didalam penyusunan anggaran pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat masalah keagenan dalam menetapkan anggaran pendapatan daerah yang dapat terlihat ketika pengusul anggaran dan pemberi persetujuan atas usulan anggaran tersebut memiliki kepentingan pribadi atau perilaku oportunistik yang diakomodir dalam anggaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andrian & Sari (2020) yang menyatakan bahwa terjadinya efek *ratchet* dalam penganggaran pendapatan asli daerah.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Belanja Daerah

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Belanja Daerah					
(Constant)	4341454107.707	3334771820.162		1.302	.197
$\gamma^+(R_APBD_{t-1} - A_APBD_{t-1})$.435	.167	.277	2.597	.011
$\gamma^-(R_APBD_{t-1} - A_APBD_{t-1})$.074	.095	.084	.784	.435

Sumber: Data Diolah

Pada tabel 3 menunjukan bahwa baik koefisien varian positif maupun varian negatif anggaran belanja daerah menunjukkan terjadinya efek *ratchet*. Penelitian yang dilakukan oleh Susanto & Halim (Susanto & Halim, 2018), sangat mendukung terhadap hasil penelitian ini, yang menyatakan bahwa terjadinya efek *ratcheting* pada penganggaran belanja dalam APBD. Hal ini jelas bahwa baik itu *underspending* maupun *overspending* merupakan varian anggaran yang sangat penting untuk menentukan anggaran belanja di masa depan (Arsani & Sihombing, 2020). Larkey & Smith (1989) menyatakan bahwa dalam proses perencanaan penganggaran pada pemerintah daerah, itu tidak akan lepas dari yang namanya perkiraan belanja, dan juga peramalan pendapatan. Hal inilah yang dijadikan agen peluang untuk memodifikasi anggaran tersebut. Begitu juga dengan pernyataan (Smith & Bertozzi, 1996) menjelaskan yang paling berpengaruh terhadap besaran varian, itu adalah *agency* yang selalu berupaya memaksimalkan anggarannya. Sedangkan menurut pandangan Isaken (Isaken, 2005) dan Abdullah (Abdullah, 2012) memandang bahwa pada setiap tahapan penyusunan

anggaran selalu mencari celah untuk bagaimana anggaran yang ditetapkan memiliki kelebihan jumlah nantinya, hal ini dilakukan atas persetujuan kerjasama antara pengusul anggaran dengan pemberi persetujuan dan pengesahan anggaran tersebut. Pada setiap proses penyusunan anggaran tersebut, terdapat ruang terjadinya praktik korupsi.

Hasil penelitian mengenai efek *ratchet* pada pendapatan daerah dan belanja daerah selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2018) yang menyatakan bahwa akibat adanya efek *ratchet* ini yang terjadi di dalam dua komponen APBD yaitu pada komponen pendapatan asli daerah (PAD) dan komponen belanja langsung sangat mempengaruhi. Artinya disini adanya peningkatan belanja daerah dan belanja langsung yang disebabkan oleh kepentingan yang hanya menguntungkan diri pribadi tersebut. Arsani & Sihombing (2020), Susanto & Halim (2018), Leone & Rock (2002), Lim (2011) menyatakan bahwa peningkatan anggaran pendapatan untuk masa yang akan datang, jika memiliki kaitan dengan anggaran pendapatan yang memiliki varian positif maka disinilah terjadinya *ratcheting* dan sebaliknya peningkatan anggaran pendapatan di masa mendatang tidak memiliki kaitan dengan anggaran pendapatan yang memiliki varian negatif. Begitu juga dengan anggaran belanja, yang paling banyak mendapat respon lebih besar dalam penentuan anggaran untuk masa yang akan datang adalah varian negative jika dibandingkan dengan varian positif.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diperoleh hasil kesimpulan bahwa efek *ratchet* terjadi dalam penganggaran pemerintah daerah SKPD Provinsi Sumatera Barat baik dalam penganggaran belanja daerah maupun anggaran PAD. Hal ini menunjukkan bahwa timbulnya *asymmetric ratchet* dan perilaku oportunistik dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya untuk memperbanyak sampel penelitian dengan lingkup yang lebih luas dan menambah data penelitian dengan periode anggaran yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2012). *Perilaku Oportunistik Legislatif Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya: Bukti Empiris Dari Penganggaran Pemerintah Daerah Di Indonesia*. <https://Repository.Ugm.Ac.Id/95020/>
- Abdullah, S., & Junita, A. (2016). Bukti Empiris Tentang Pengaruh Budget Ratcheting Terhadap Hubungan Antara Pendapatan Sendiri Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Aceh. *Modus Journals*, 28(2), 185–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.24002/Modus.V28i2.850>
- Afryansyah, R. D. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi Di Internet Oleh Pemerintah Daerah. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi Di Internet Oleh Pemerintah Daerah*, 2, 702–712.
- Andreas, A., & Sari, V. F. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Dan Budget Ratcheting Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 1984–2000. <http://jea.pjj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/191>
- Anessi-Pessina, E., Sicilia, M., & Steccolini, I. (2012). Budgeting And Rebudgeting In Local Governments: Siamese Twins? *Public Administration Review*, 72(6), 875–884. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02590.x>
- Anton, F. (2010). Towards Stewardship Theory Manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika*, 1(2), 61–80.
- Arsani, A. M., & Sihombing, P. R. (2020). Budget Ratcheting In Indonesia And The Implementation Of Performance-Based Budgeting System During Pandemic. *Jurnal*

- Mantik*, 4(1), 172–180.
<https://iocscience.org/Ejournal/Index.php/Mantik/Article/View/726>
- Bawono, I. R., Halim, A., & Lord, B. (2012). Public Sector Performance Measurement And Budget Allocation: An Indonesian Experiment. *Presented At 6th Nz Management Accounting Conference*.
- Bouwens, J., & Kroos, P. (2011). Target Ratcheting And Effort Reduction. *Journal Of Accounting And Economics*, 51(1–2), 171–185.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.07.002>
- Dpkd.Sumbarprov.Go.Id. (2020). *Lra Skpd*. <https://dpkd.sumbarprov.go.id/lra-skpd.html>
- Fisher, J. G., Frederickson, J. R., & Peffer, S. A. (2006). Budget Negotiations In Multi-Period Settings. *Accounting, Organizations And Society*, 31(6), 511–528.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.aos.2005.12.008>
- Forrester, J. P., & Mullins, D. R. (1992). Rebudgeting: The Serial Nature Of Municipal Budgetary Processes. *Jstor*, 52(5), 467–473. <https://doi.org/10.2307/976806>
- Indjejikian, R., & Nanda, D. (1999). Dynamic Incentives And Responsibility Accounting. *Journal Of Accounting And Economics*, 27(2), 177–201.
[https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(99\)00009-9](https://doi.org/10.1016/S0165-4101(99)00009-9)
- Isaken, J. (2005). The Budget Process And Corruption. *U4issue*, 3.
<https://www.cmi.no/publications/2559-the-budget-process-and-corruption>
- Larkey, P. D., & Smith, R. A. (1989). Bias In The Formulation Of Local Government Budget Problems. *Policy Sciences*, 22(2), 123–166.
<https://link.springer.com/article/10.1007/Bf00141382>
- Lee, T. M., & Plummer, E. (2007). Busget Adjustments In Response To Spending Variances: Evidence Of Ratcheting Of Local Government Expenditures. *Journal Of Management Accounting Research*, 19(1), 137–167.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2308/jmar.2007.19.1.137>
- Leone, A. J., & Rock, S. (2002). Empirical Tests Of Budget Ratcheting And Its Effect On Managers' Discretionary Accrual Choices. *Journal Of Accounting And Economics*, 33(1), 43–67. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(01\)00044-1](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00044-1)
- Lim, D. (2011). *Budget Ratcheting And Agency Problem* [The University Of Texas At Dallas].
<https://search.proquest.com/openview/645bff2b5a582753650116019d2d5eb8/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>
- Marlina, L. (2019). Efek Ratcheting Dalam Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Akbis*, 3(1), 39–47.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35308/akbis.v0i0.1019>
- Marlowe, J. (2009). Budget Variance, Slack Resources, And Municipal Expenditures. *Ssrn*.
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1505646>
- Nurhayati, N., & Suhendar, D. (2018). Pengaruh Budget Ratcheting Terhadap Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Iii Cirebon. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 4(1), 29–32.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25134/jrka.v4i1.1429>
- Pratiwi, E. T., Abdullah, R., Abdullah, L. O. D., & Dja'wa, A. (2020). The Effect Of Budget Ratcheting On Financial And Non-Financial Performance. *Proceedings Of The 4th International Conference On Management, Economics And Business (Icmeb 2019)*, 23–27. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200205.006>
- Robinson, M., & D., L. (2009). A Basic Model Of Performance-Based Budgeting. *Technical Notes And Manuals*, 09(01), 1–12.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*

- Indonesia*, 9(2), 154–170. <https://doi.org/10.21002/Jaki.2012.10>
- Smith, R. W., & Bertozzi, M. (1996). Principals And Agents: An Explanatory Model For Public Budgeting. *Journal Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 10(3). <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/jpbafm-10-03-1998-b001/full/html>
- Susanto, A. A. (2018). Varian Anggaran Dan Peran Akuntansi Pertanggungjawaban Pada Penganggaran Pemerintah Daerah. *Ekbis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2). <https://doi.org/10.14421/Ekbis.2017.1.2.1055>
- Susanto, A. A., & Halim, A. (2018). Efek Ratchet Pada Anggaran Pemerintah Daerah: Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Akuntabilitas Publik*, 1(1), 88–96. <https://doi.org/10.22146/Jaap.35337>
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. (2014).
- Voorhees, W. R. (2006). Consistent Underestimation Bias, The Asymmetrical Loss Function, And Homogeneous Sources Of Bias In State Revenue Forecasts. *Journal Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 18(1), 61–76.
- Weitzman, M. (1980). The “Ratchet Principle” And Performance Incentives. *Bell Journal Of Economics*, 11(1), 302–308. https://econpapers.repec.org/article/Rjebellje/V_3a11_3ay_3a1980_3ai_3aspring_3ap_3a302-308.htm